

BAB V

KESIMPULAN

VI.1. Kesimpulan

Sebagai negara homogen Jepang pada mulanya merupakan negara yang cukup canggung terhadap migrasi. Pekerja migran dari seluruh negara banyak mengalami kesulitan untuk bermigrasi ke Jepang. Kesulitan tersebut kemudian berubah karena dipengaruhi oleh kondisi demografi yang terjadi di Jepang. Permasalahan tersebut mengharuskan Jepang untuk lebih terbuka terhadap kedatangan pekerja migran ke negaranya. Pergeseran tersebut semakin dirasakan sejak dibukanya program kerja sama pada visa *Tokutei Ginou*. Berdasarkan penerimaan pekerja migran yang ada di Jepang, program *Kenshusei* dan *Tokutei Ginou* merupakan suatu kesenjangan dan permasalahan yang terjadi para program *Kenshusei* masih ditemukan juga pada program *Tokutei Ginou*.

Kebutuhan Jepang terhadap pekerja terampil yang mulai ditempatkan pada 14 sektor pekerjaan di Jepang dapat dimanfaatkan oleh banyak pekerja migran untuk membangun karir serta mendukung pembangunan di Jepang. Dalam mengatasi permasalahan populasi yang menua di masyarakat Jepang telah membangun kerja sama dengan negara mitra seperti Indonesia. Terjalinnnya kerja sama ini menjadikan bukti bahwa Jepang tengah berusaha untuk membangun koneksi dalam mengupayakan pembangunan bagi kedua negara. Terdapat kontrak yang mengikat antara Jepang-Indonesia pada Program *Tokutei Ginou* berdasarkan hasil negosiasi yang telah dilakukan secara bilateral. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Jepang pada program *Tokutei Ginou* ini ialah dapat menerima pekerja migran dari seluruh negara mitra dari tahun 2019 – 2024 sekitar 340.150 orang.

Program *Tokutei Ginou* ini merupakan program yang telah dirancang pada bulan Desember 2018 lalu. Melalui hasil yang diperoleh tersebut Pemerintah Jepang telah menyepakati Amandemen Undang-Undang mengenai Kontrol Migrasi serta

Pengakuan Terhadap Pengungsi yang mulai diberlakukan pada April 2019. Berdasarkan perancangan yang telah disepakati tersebut, skema penempatan yang berlaku ialah penempatan B to C dan juga kepengurusan dari seluruh pekerja migran terampil di Jepang yang sepenuhnya diawasi oleh Biro Migrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai kondisi pekerja migran kepada MoJ selaku Kementerian di Jepang yang mengayomi WNA di Jepang. Pihak-pihak yang terliat pada keberlangsungan dari program *Tokutei Ginou* ini ialah MoJ, Biro Migrasi, AO, dan RSO. Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh Peneliti memberikan fakta bahwa kerja sama ketenagakerjaan yang telah terjalin tersebut pelaksanaannya belum maksimal.

Tujuan awal dari ditetapkannya program *Tokutei Ginou* ini untuk mempersiapkan Tokyo Olympic 2020. Kenyataannya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan di Jepang sehingga olimpiade tingkat internasional tersebut harus ditunda. Pekerja migran yang berada di Jepang dengan visa *Tokutei Ginou* diperlukan untuk menciptakan revitalisasi ekonomi bagi perusahaan besar di Jepang. Dalam membangkitkan perekonomian lokal di Jepang pekerja migran memiliki andil yang penting dalam memanfaatkan tenaga otot dan kecanggihan teknologi di Jepang. Kodrat dari pekerja migran terampil di Jepang dijadikan sebagai aset berharga bagi perusahaan besar dalam mendorong produktifitas perekonomian di sektor swasta.

Fenomena yang terjadi di Jepang selama keberlangsungan dari penempatan pekerja migran hanya difokuskan pada sektor keperawatan sehingga implementasi dari program *Tokutei Ginou* ini tidak berjalan dengan baik. Tingkat penularan dari virus COVID-19 ini banyak menyerang populasi lansia di Jepang. Adanya spesialisasi atas kebutuhan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan program *Tokutei Ginou* hanya terfokus pada 1 bidang. Sebagai salah satu target utama dari penempatan pekerja migran sebagai pengasuh orang tua permintaan tersebut disampaikan Jepang kepada Indonesia. Menyikapi kebutuhan yang sangat mendesak tersebut Pemerintah Indonesia

berusaha untuk memperkuat proses penyerapan CPMI terutama bagi *new comer*. Keterlibatan pihak Kemnaker, BP2MI, dan LPK pada Kerja Sama Bilateral melalui Program *Tokutei Ginou* memanfaatkan peluang yang diberikan sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Sebagai PMI yang diberangkatkan dengan visa *Tokutei Ginou* dapat menunjang kesejahteraan mereka untuk terhindar dari depresi selama bekerja dan hak-hak yang direnggut. Program *Tokutei Ginou* memastikan bahwa setiap PMI dapat terlindungi selama tinggal di Jepang melalui penempatan secara legal. Pihak Indonesia telah menjalin koordinasi dengan pihak Perwakilan RI yakni KBRI Tokyo dan KJRI Osaka dalam memberikan pengawasan yang maksimal terhadap PMI selama di Jepang. Bekerja sama dengan Biro Migrasi, Perwakilan RI dapat menjamin bahwa PMI di Jepang telah diawasi secara berkala. Seluruh pengurusan dari perlindungan PMI dengan visa *Tokutei Ginou* di Jepang mendapatkan perlakuan yang setara dengan pekerja lokal di Jepang.

Persiapan penempatan CPMI untuk bekerja sebagai tenaga terampil di Jepang dibangun menggunakan sistem *outsourcing*. Penyaluran tenaga kerja migran kepada perusahaan ini dilakukan oleh AO sebagai organisasi yang memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan terhadap kontrak kerja dari PMI. Dalam menyesuaikan kebutuhan AO atas CPMI didukung sepenuhnya oleh RSO, meskipun sudah disesuaikan namun masih banyak kegagalan yang dialami oleh CPMI dikarenakan standar CPMI yang masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu Kemnaker, BP2MI, dan LPK menjalin koordinasi untuk dapat meningkatkan minat masyarakat sehingga mau terlibat tanpa adanya paksaan sebagai pekerja terampil dengan visa *Tokutei Ginou*.

Proses terlaksananya Kerja Sama Bilateral antara Jepang-Indonesia secara pengelolaan telah menunjang kebutuhan yang menjadi permasalahan dalam melakukan migrasi internasional ke Jepang. Dalam mendukung revitalisasi ekonomi dan mengatasi penempatan ilegal di Jepang dapat diwujudkan dengan mengelola program Kerja Sama *Tokutei Ginou* ini dengan sebaik mungkin. Berdasarkan hasil temuan yang

telah dilakukan menunjukkan bahwa Jepang telah bertransformasi dalam mendukung penuh penempatan PMI pada sektor informal namun masih terkendala karena masih terdapat masyarakat maupun perusahaan yang menolak keberadaan PMI terampil di Jepang serta pihak Indonesia yang belum dapat mengatasi masalah yang lumrah terjadi dalam mewujudkan penempatan migrasi internasional. Masih banyak ditemukannya kepengurusan dokumen yang berbelit-belit, pemalsuan dokumen, pemberangkatan secara ilegal dan praktik korupsi yang terjadi sehingga negosiasi di atas kertas melalui MoU dan juga signifikansi dalam mengupayakan pertumbuhan CPMI melalui program *Tokutei Ginou* yang telah dilakukan belum memperoleh hasil yang memuaskan dalam mendukung pemenuhan lapangan pekerjaan di Indonesia.

VI.2. Saran

Saran Praktis

Selama keberlangsungan dari program *Tokutei Ginou* banyak menemui masalah dari pihak-pihak yang terlibat baik Jepang maupun Indonesia. Kurangnya penegakkan hukum yang kuat pada masing-masing pihak yang melanggar menyebabkan tidak adanya efek jera yang menyebabkan penempatan PMI secara ilegal masih terjadi. Terdapat kepentingan yang dipaksakan dari AO terhadap LPK untuk dapat mempercepat penempatan CPMI ke Jepang. Langkah prosedural yang banyak dipalsukan mulai dari visa palsu, hasil PCR palsu, dan praktik suap dalam mengurus e-ID serta e-TKLN. Sindikat tersebut telah menjalin kerja sama dengan oknum dari BP2MI melalui biaya yang dikeluarkan oleh CPMI dalam jumlah yang besar karena janji-janji manis selama proses registrasi CPMI pada LPK yang tidak bertanggung jawab.

Solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut dengan menjalin koordinasi dalam memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat memprioritaskan kesejahteraan PMI pada program *Tokutei Ginou*. Minimnya keterlibatan dari Kemnaker dalam mengawasi dan menjalin koordinasi dengan BP2MI dan LPK juga menyebabkan penempatan ilegal ini dapat terjadi sehingga seluruh pihak yang terlibat

memainkan peranan penting dalam membangun lingkungan migrasi internasional yang sehat. Kegiatan migrasi internasional ke Jepang yang belum kondusif harus dapat diminimalisir dengan pembenahan sistem dan mengatasi masalah sampai ke akarnya. Banyaknya CPMI yang dieksploitasi oleh negaranya sendiri menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat masih ditemukan berorientasi pada uang sehingga belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan CPMI. Melalui Kerja Sama Bilateral pada program *Tokutei Ginou* Jepang telah membuka kesempatan bagi PMI pada sektor informal untuk memperoleh kesejahteraan selama di Jepang sehingga diharapkan bahwa orientasi penyerapan diarahkan pada CPMI yang memiliki tekad kuat dan juga tentunya didukung dengan pengelolaan yang maksimal pihak-pihak yang terlibat dengan maksimal.

Saran Akademis

Kontribusi hasil penelitian ini terhadap ilmu Hubungan Internasional menunjukkan bahwa peranan kedua negara baik dari Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia saling selaras dalam membangun Kerja Sama Bilateral atas dasar negosiasi kedua negara sehingga dapat menciptakan keadilan bagi PMI dan Perusahaan Jepang. Kerja sama tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi dengan memberlakukan visa baru. Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan banyak peneliti kedepannya dapat berkontribusi untuk meneliti permasalahan yang terjadi pada kegiatan migrasi internasional bagi PMI pada sektor informal sebagai tenaga terampil. Pelaksanaan dari Kerja Sama Bilateral terutama untuk menunjang kegiatan migrasi internasional ke Jepang masih difokuskan pada penempatan sektor informal jalur magang terutama sektor formal sehingga masih diperlukannya identifikasi lanjutan atas permasalahan yang terjadi. Besar harapan Peneliti melalui hasil temuan ini dapat dikembangkan secara lebih lanjut dalam menunjang perkembangan studi Hubungan Internasional.